



Pengaruh Pengawasan Internal terhadap Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Bekti Ayu Dian Pramiswari^{1*}, Lilis Ardini²

¹⁻²Program Studi Magister Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Indonesia Surabaya, Indonesia

*Penulis Korespondensi: bektiayu030420@gmail.com

Abstract. *This study aims to analyze the influence of internal supervision on the quality of local government performance reporting. Internal supervision plays an important role in ensuring that the processes of planning, implementation, performance, measurement, evaluation, and reporting are carried out effectively, transparently, accountably, and in accordance with applicable regulations. This study employs a qualitative approach using a literature review method based on previous studies published in nationally accredited SINTA indexed scientific journals. The data used are secondary data obtained from various articles discussing internal supervision or internal control, reporting systems, performance accountability and reporting quality in local government organizations. The analysis was conducted through literature identification and selection, classification of research findings, content analysis and synthesis of previous research findings. The results indicate that internal supervision or internal control tends to have a positive relationship with local government accountability and performance. Internal supervision functions as a monitoring mechanism that can reduce the risk of information errors, discrepancies between performance targets and achievements and improve the reliability of information presented in performance reports. In addition, an effective reporting system also contributes to performance accountability and complements the role of internal supervision. Therefore, the more effective the internal supervision implemented by local governments, the greater the likelihood of producing high quality, transparent and accountable performance reporting.*

Keywords: *Accountability; Internal Control; Internal Supervision; Local Government Performance; Reporting Quality.*

Abstrak. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal memiliki peran penting dalam memastikan bahwa proses perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja pemerintah daerah dilakukan secara efektif, transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*) berdasarkan penelitian terdahulu yang dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari berbagai artikel yang membahas pengawasan atau pengendalian internal, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelaporan pada sektor pemerintahan daerah. Analisis dilakukan melalui identifikasi dan seleksi literatur, pengelompokan hasil penelitian, analisis isi, serta sintesis temuan penelitian terdahulu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan atau pengendalian internal memiliki kecenderungan hubungan positif dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal berperan sebagai mekanisme pemantauan yang dapat mengurangi risiko kesalahan informasi, ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta meningkatkan keandalan informasi yang disajikan dalam laporan kinerja. Selain itu, sistem pelaporan yang baik juga berperan dalam mendukung akuntabilitas kinerja dan melengkapi fungsi pengawasan internal. Dengan demikian, semakin efektif pengawasan internal yang diterapkan oleh pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan terciptanya pelaporan kinerja yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Kata Kunci: Akuntabilitas; Kinerja Pemerintah Daerah; Kualitas Pelaporan; Pengawasan Internal; Pengendalian Internal.

1. LATAR BELAKANG

Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab yang besar dalam mengelola sumber daya publik dan melaksanakan berbagai program pembangunan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Menurut Undang-Undang nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintahan daerah, menyatakan bahwa pemerintah daerah diberi kewenangan untuk mengelola urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan potensi dan kebutuhan daerah

masing-masing. Pemerintah daerah dibentuk untuk mengutamakan kepentingan masyarakat dan memajukan layanan publik dengan cara meningkatkan kinerja menjadi lebih baik (Sari & M. Taufik, 2025). Pelaksanaan tanggung jawab tersebut tidak hanya dituntut untuk menghasilkan *output* dan *outcome* yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan, tetapi juga harus disertai dengan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya publik secara transparan, efektif, efisien, dan akuntabel. Dalam pemerintahan daerah, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) memiliki peranan yang penting yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik dan sebagai pengelola sumber daya daerah, sehingga kinerjanya menjadi indikator utama dalam keberhasilan tata kelola pemerintahan daerah (Temalagi, Selva *et al.*, 2026). Salah satu bentuk pertanggungjawaban pemerintahan daerah dapat diwujudkan melalui pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pelaporan kinerja merupakan indikator yang sangat penting untuk memberikan informasi mengenai tingkat pencapaian tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pemerintah serta menjadi dasar bagi pemerintah dan masyarakat dalam menilai keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan.

Pengukuran kinerja adalah ukuran sistematis dari program yang direncanakan dan tingkat keberhasilan (Nordiawan & Hertianti, 2010 dalam Rahmasari & Doddy, 2022). Dalam pengukuran kinerja harus berfokus dan memperhatikan tentang keterbukaan, akuntabilitas dan partisipasi. Pengukuran kinerja memiliki tiga indikator sebagai berikut, yaitu indikator pengukuran upaya pelayanan, indikator pengukuran pencapaian pelayanan, dan indikator untuk menghubungkan upaya dan pencapaian (Rahmasari & Doddy, 2022). Kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah menjadi salah satu aspek penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga, informasi yang disajikan dalam laporan kinerja tidak hanya berfungsi sebagai dokumen administratif, tetapi juga menjadi dasar dalam proses evaluasi dan pengambilan keputusan serta memberikan gambaran mengenai efektivitas pelaksanaan program pemerintah daerah. Oleh karena itu, kualitas pelaporan kinerja sangat menentukan sejauh mana masyarakat, pemerintah pusat, DPRD, maupun pemangku kepentingan lainnya dapat memperoleh informasi yang memadai mengenai pencapaian kinerja pemerintah daerah. Kinerja pemerintah daerah dikatakan baik apabila pemerintah mampu dalam mengelola pemerintahannya secara efektif untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di daerahnya (Sapulette, 2023 dalam Sari & M. Taufik, 2025).

Pada era reformasi seperti sekarang ini, setiap instansi sektor publik akan dihadapkan oleh berbagai macam tantangan untuk dapat memaksimalkan kinerja dari masing-masing instansinya (Viola *et al.*, 2023). Tantangan tersebut antara lain berkaitan dengan ketidaksesuaian antara perencanaan dan realisasi kinerja, indikator kinerja yang belum

sepenuhnya menggambarkan hasil program, kualitas data kinerja yang belum optimal, serta pelaporan yang lebih berorientasi pada pemenuhan kewajiban administratif dibandingkan penyajian informasi mengenai hasil dan manfaat program. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa sistem pelaporan belum secara otomatis menjamin terciptanya laporan kinerja yang berkualitas. Diperlukan mekanisme pengawasan yang memadai untuk memastikan bahwa proses pengumpulan data, pengukuran, evaluasi, dan pelaporan kinerja telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan tujuan organisasi. Untuk mencapai akuntabilitas kinerja pemerintah yang baik, efektif, efisien, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik, diperlukan pengawasan melalui pengendalian intern (Widiyastuti *et al.*, 2025).

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008, pengendalian internal adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Pengendalian internal dalam pemerintahan daerah diselesaikan oleh inspektorat otoritas pemerintahan daerah dalam tugasnya melakukan pengamatan terhadap penyajian unit-unit otoritatif di dalam lingkungannya (Hendrianto *et al.*, 2022). Dalam pemerintahan daerah, pengawasan internal juga berperan dalam mengidentifikasi kelemahan dalam pelaksanaan program, mencegah kesalahan atau penyimpangan, memberikan rekomendasi perbaikan, serta memastikan tindak lanjut atas hasil evaluasi.

Demi mewujudkan tata kelola penyelenggaraan pemerintah yang baik (*good governance*) maka pemerintah membentuk suatu sistem agar dapat mengendalikan seluruh kegiatan yang ada dalam pemerintah, dimana sistem yang dimaksud adalah Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP). Dalam SPIP, ada lima unsur sistem pengendalian intern pemerintah yaitu: lingkungan pengendalian, kegiatan pengendalian, informasi, komunikasi dan pemantauan (pengawasan). Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) diselenggarakan secara menyeluruh di semua lingkungan pemerintah pusat maupun daerah (Mujennah *et al.*, 2022). Keberadaan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya inspektorat daerah, memiliki kewenangan dalam pelaksanaan pengawasan internal pemerintah daerah. APIP tidak hanya berfungsi melakukan pemeriksaan terhadap pelaksanaan kegiatan, tetapi juga melakukan reviu, evaluasi, pemantauan, dan pemberian konsultasi dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan. Pengawasan terhadap proses pengukuran dan pelaporan kinerja dapat membantu pemerintah daerah memastikan bahwa informasi yang dilaporkan sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Dengan adanya pengawasan yang efektif,

potensi terjadinya kesalahan dalam penyajian data kinerja, ketidaksesuaian antara target dan realisasi, maupun manipulasi informasi dapat diminimalkan.

Meskipun penelitian mengenai pengendalian internal, sistem pelaporan, dan akuntabilitas kinerja pemerintah telah cukup banyak dilakukan, namun masih terdapat ruang untuk penelitian lebih lanjut. Sebagian penelitian terdahulu lebih banyak menggunakan akuntabilitas kinerja atau kualitas laporan keuangan sebagai variabel dependen. Sementara itu, penelitian yang secara khusus menguji pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah masih relatif terbatas. Padahal, pengawasan internal tidak hanya berkaitan dengan pencapaian kinerja organisasi, tetapi juga berperan dalam memastikan bahwa proses pengukuran dan pelaporan kinerja menghasilkan informasi yang berkualitas. Perbedaan fokus tersebut menunjukkan adanya *research gap* yang dapat dikembangkan dalam penelitian ini. Selain itu, terdapat kemungkinan bahwa efektivitas pengawasan internal pada masing-masing pemerintah daerah berbeda. Perbedaan kompetensi APIP, kualitas pelaksanaan pengawasan, tindak lanjut hasil pemeriksaan, komitmen pimpinan, serta kualitas sistem informasi dapat memengaruhi efektivitas pengawasan dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja.

Berdasarkan uraian tersebut, pengawasan internal menjadi faktor yang penting untuk dikaji dalam kaitannya dengan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal yang efektif diharapkan mampu memastikan bahwa proses pengumpulan data, pengukuran, evaluasi, dan penyajian informasi kinerja dilakukan secara tepat dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Sehingga, pelaporan kinerja yang berkualitas dapat meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Dengan demikian, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis dan menguji pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam memperkaya literatur mengenai pengawasan internal dan pelaporan kinerja sektor publik serta memberikan kontribusi praktis bagi pemerintah daerah, khususnya dalam meningkatkan efektivitas pengawasan internal sebagai upaya untuk menghasilkan pelaporan kinerja yang lebih berkualitas, transparan, dan akuntabel.

2. KAJIAN TEORITIS

Teori Agensi

Teori agensi menjelaskan hubungan kontraktual antara *principal* dan *agent*, dimana *principal* mendelegasikan kewenangan kepada *agent* untuk mengelola sumber daya dan mengambil keputusan atas nama *principal* (Jensen and Meckling, 1976). Dalam pemerintahan daerah di Indonesia, konsep akuntabilitas dapat dijelaskan melalui teori agensi, dimana masyarakat berperan sebagai prinsipal dan pemerintah daerah sebagai agen. Melalui proses pemilihan kepala daerah, masyarakat akan memilih kepala daerah dan juga anggota legislatif untuk menjadi perpanjangan aspirasi dari masyarakat dimana termasuk dalam mengelola sumber daya dan keuangan daerah. Akuntabilitas dapat diartikan sebagai kewajiban agen dimana pemerintah yang terpilih bertanggung jawab untuk, menyajikan, dan melaporkan secara transparan seluruh aktivitas yang telah dilaksanakan baik dari anggaran maupun pelaksanaan program atau kegiatan agar dapat dipertanggungjawabkan kepada prinsipal, yaitu masyarakat (Jannah *et al.*, 2021). Secara umum, pemerintah daerah bertindak sebagai agen publik untuk menyampaikan layanan publik dan kesejahteraan sosial kepada masyarakat, dimana masyarakat mendelegasikan wewenang kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber daya ekonomi publik (Muhtar *et al.*, 2021). Oleh karena itu, agar masyarakat dapat menilai apakah sumber daya publik sudah dialokasikan dan dimanfaatkan secara efisien dan efektif, pelaporan sektor publik harus mampu menyampaikan informasi yang jelas dan mutakhir mengenai struktur organisasi dan proses penyediaan layanan publik (Putri, 2025).

Hubungan antara *principal* dan *agen* dalam sektor publik rentan terhadap konflik kepentingan dan asimetri informasi, terutama ketika agen tidak memiliki kompetensi yang memadai atau ketika mekanisme pengendalian organisasi lemah (Temalagi *et al.*, 2026). Pengawasan internal dapat membantu memastikan bahwa pelaksanaan kegiatan pemerintah daerah sesuai dengan tujuan dan peraturan yang telah ditetapkan serta bahwa informasi yang disajikan dalam laporan kinerja dapat dipercaya, sehingga dapat mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dan kesalahan informasi serta membantu meningkatkan kualitas pertanggungjawaban pemerintah daerah. Oleh karena itu, teori keagenan memberikan dasar teoritis bahwa pengawasan internal berpotensi meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

Pengawasan Internal

Pengawasan internal merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena berfungsi untuk memastikan bahwa kegiatan organisasi telah dilaksanakan sesuai dengan tujuan, kebijakan, peraturan, dan ketentuan yang berlaku. Pengawasan internal

berkaitan erat dengan pengendalian internal. Sistem pengendalian internal adalah rangkaian aturan dan prosedur yang disusun untuk menjaga keamanan aset dalam organisasi, memastikan data akuntansi yang akurat, meningkatkan efisiensi kerja, serta memastikan semua pihak mematuhi semua aturan organisasi (Mulyadi, 2016 dalam Sari & Agus, 2025). Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008, sistem pengendalian internal adalah proses yang terintegral pada tindakan dan kegiatan untuk memberikan pemahaman yang memadai tentang tercapainya suatu tujuan dari organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien.

Dalam pemerintah daerah, pengawasan internal memiliki peran yang strategis dalam memastikan bahwa penggunaan sumber daya publik, pelaksanaan program, serta pencapaian target kinerja dapat dipertanggungjawabkan oleh pemerintah. Pengawasan yang efektif dapat membantu organisasi dalam mengidentifikasi risiko dan kelemahan sejak dini sehingga tindakan perbaikan dapat dilakukan sebelum permasalahan tersebut memengaruhi pencapaian tujuan organisasi maupun kualitas informasi yang dilaporkan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014, APIP (Aparat Pengawasan Intern Pemerintah) adalah inspektorat jenderal, unit pengawasan lembaga pemerintah non-kementerian, inspektorat provinsi, dan inspektorat kabupaten atau kota. Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah juga menetapkan poin-poin terkait pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dilakukan oleh APIP sesuai wilayah Provinsi / Kabupaten / Kota. Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), yang terdiri dari Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), Inspektorat Jenderal (Itjen), Inspektorat Provinsi, dan Inspektorat Kabupaten / Kota, ditugaskan untuk melakukan audit, evaluasi, dan kegiatan pengawasan lainnya, seperti pemantauan, konsultasi, dan pendampingan, sesuai dengan Pasal 47 Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah. APIP melaksanakan tugasnya dengan memberikan peringatan dini, meningkatkan efisiensi manajemen risiko, dan meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan. APIP bertanggung jawab untuk memberikan keyakinan yang memadai atas pencapaian tujuan oleh instansi pemerintah (Prakoso & Titik, 2024).

Kinerja Pemerintah Daerah

Menurut Mahsun (2006), kinerja merupakan kemampuan kerja yang ditunjukkan dengan hasil dari kerja tersebut. Kinerja adalah gambaran mengenai suatu tingkat dalam pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi suatu organisasi yang tertuang dalam perumusan skema strategis suatu organisasi (Bastian, 2010 dalam Auditya *et al.*, 2013). Berdasarkan Permenpan nomor 25 tahun 2012, pengukutan kinerja digunakan

sebagai dasar dalam menilai suatu keberhasilan atau kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan yang sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Dimana pengukuran yang dimaksud adalah hasil dari suatu penilaian (*assessment*) yang sistematis dan telah didasarkan pada kelompok indikator kinerja suatu kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat serta dampak.

Sedangkan, kinerja pemerintah adalah ukuran keberhasilan suatu organisasi yang dapat ditunjukkan secara nyata dan dapat diukur, dimana dalam hal ini menggambarkan bahwa pegawai mempunyai peranan yang penting dalam organisasi tersebut, sehingga harus mampu mewujudkan perubahan secara inovatif (Mattoasi *et al.*, 2021). Menurut Permenpan (2007), kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai tingkat pencapaian sasaran atau tujuan instansi pemerintah sebagai penjabaran dari visi, misi dan strategi instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program maupun kebijakan yang telah ditetapkan. Indikator dalam pengukuran kinerja yang baik adalah memiliki karakteristik yang relevan, *unambiguous*, *cost effective* dan *simple*, serta berfungsi sebagai suatu sinyal yang menunjukkan adanya masalah yang membutuhkan tindakan manajemen dan investigasi lebih lanjut (Sumarsono, 2010).

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Rahmasari dan Doddy (2022), yang berjudul “*Maturity of Internal Control System, the Capability of Internal Auditors, and Performance Accountability in Local Governments*”, menunjukkan adanya hubungan antara pengawasan atau pengendalian internal dengan kinerja dan akuntabilitas pemerintah. Penelitian tersebut menunjukkan pentingnya sistem pengendalian internal dan kapasitas auditor internal dalam mendukung akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh Hendiranto, *et al.* (2022) dengan judul “Implementasi Pelaporan Akuntansi Sektor Publik Dan Pengendalian Intern Terhadap Akuntabilitas Kinerja Pada Instansi Pemerintah”, juga menunjukkan keterkaitan antara pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern dengan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian tersebut menegaskan bahwa mekanisme pengendalian intern memiliki peranan dalam mendukung pertanggungjawaban kinerja pemerintah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Nuraeni, *et al.* (2023) dengan judul “Pengaruh Kualitas Laporan Keuangan, Pemanfaatan Teknologi, Pengendalian Internal dan Sistem Pelaporan terhadap Akuntabilitas Kinerja” menunjukkan bahwa pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif dan signifikan terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa kualitas

mekanisme pengendalian dan sistem pelaporan merupakan bagian penting dalam membangun akuntabilitas kinerja organisasi pemerintah.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur (*literature review*). Metode ini digunakan untuk menganalisis dan memahami hubungan antara pengawasan internal dan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah berdasarkan hasil penelitian terdahulu yang telah dipublikasikan dalam jurnal ilmiah nasional terakreditasi SINTA. Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang diperoleh dari artikel ilmiah yang membahas pengawasan internal, sistem pengendalian internal, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja, dan kualitas pelaporan pada sektor pemerintahan daerah. Pemilihan literatur dilakukan berdasarkan beberapa kriteria, yaitu: (1) artikel membahas pengawasan atau pengendalian internal pada organisasi pemerintah; (2) artikel membahas pelaporan kinerja, akuntabilitas kinerja, atau kualitas informasi pelaporan; (3) penelitian memiliki keterkaitan dengan pemerintah daerah atau organisasi perangkat daerah.

Tahapan analisis dilakukan melalui identifikasi literatur, seleksi artikel, pengelompokan hasil penelitian, analisis isi, dan penarikan kesimpulan. Artikel yang telah dipilih kemudian dianalisis untuk mengidentifikasi konsep pengawasan internal, mekanisme pengawasan, kualitas pelaporan kinerja, serta hubungan antara kedua variabel tersebut. Analisis dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan temuan dari berbagai penelitian terdahulu. Hasil penelitian kemudian dikelompokkan berdasarkan persamaan dan perbedaan temuan untuk memperoleh pemahaman mengenai bagaimana pengawasan internal dapat memengaruhi kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Sintesis Penelitian Terdahulu

No	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
1	Rahmasari & Doddy (2022)	Maturitas sistem pengendalian internal, kapabilitas auditor internal, akuntabilitas kinerja	Maturitas sistem pengendalian internal dan kapabilitas auditor internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
2	Nuraeni, Yulinda & Naufal (2023)	Kualitas laporan keuangan, teknologi informasi, pengendalian internal, sistem pelaporan, akuntabilitas kinerja	Pengendalian internal dan sistem pelaporan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja
3	Hendiranto, Sakti & Andri (2022)	Pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern, akuntabilitas kinerja	Menunjukkan keterkaitan pengendalian intern dan pelaporan dengan akuntabilitas kinerja

No	Peneliti dan Tahun	Fokus Penelitian	Hasil Penelitian
4	Viola, Andriana & Oktaviani (2023)	Kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal, kualitas SDM, akuntabilitas kinerja	Menguji pengaruh pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah
5	Temalagi, Nirwana & Aini (2026)	Kompetensi SDM dan sistem pengendalian internal, kinerja OPD	Menguji peran sistem pengendalian internal dalam meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah
6	Sari & M. Taufiq (2025)	Transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal, akuntabilitas kinerja	Mengkaji sistem pengendalian internal sebagai faktor yang berkaitan dengan akuntabilitas kinerja
7	Mattoasi, Didiet & Yaman (2021)	Sistem Pengendalian Internal, Kinerja Pemerintah Daerah	Menunjukkan penerapan sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh terhadap kinerja pemerintah

Pengawasan Internal terhadap Kualitas Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah

Berdasarkan sintesis penelitian terdahulu, dapat dikemukakan bahwa pengawasan internal memiliki kecenderungan pengaruh positif terhadap kualitas pertanggungjawaban dan pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal berfungsi untuk memastikan bahwa seluruh tahapan pelaksanaan kegiatan pemerintah, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengukuran, hingga pelaporan, telah dilakukan sesuai dengan tujuan dan ketentuan yang berlaku.

Pelaporan kinerja pada dasarnya merupakan hasil dari suatu proses yang panjang. Informasi yang terdapat dalam laporan tidak muncul secara langsung, tetapi berasal dari proses pengumpulan data, pengukuran capaian, verifikasi, evaluasi, dan penyusunan laporan. Apabila proses tersebut tidak diawasi dengan baik, terdapat risiko munculnya kesalahan informasi, ketidaksesuaian antara target dan realisasi, serta informasi yang tidak menggambarkan kondisi kinerja sebenarnya. Sehingga, pengawasan diperlukan untuk mengurangi risiko tersebut.

Dalam perspektif teori agensi, pengawasan internal berfungsi sebagai mekanisme monitoring untuk mengurangi asimetri informasi antara masyarakat sebagai principal dan pemerintah daerah sebagai agent. Pengawasan yang efektif dapat meningkatkan keandalan informasi kinerja sehingga masyarakat dan pemangku kepentingan dapat memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai pencapaian pemerintah daerah.

Berdasarkan hasil penelitian Nuraeni *et al.* (2023) memberikan bukti yang penting untuk menjelaskan hubungan tersebut. Penelitian mereka menunjukkan bahwa pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Artinya, semakin baik pengendalian internal, semakin baik pula akuntabilitas kinerja pemerintah. Pada penelitian yang sama, sistem pelaporan juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas kinerja. Temuan ini menunjukkan bahwa pengendalian dan pelaporan merupakan dua mekanisme yang saling melengkapi. Oleh

karena itu, pengawasan internal dapat dipandang sebagai mekanisme yang menjaga kualitas proses pelaporan, sedangkan sistem pelaporan merupakan mekanisme yang digunakan untuk menyampaikan hasil kinerja kepada pihak yang berkepentingan.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan keseluruhan penelitian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa terdapat tiga temuan utama, yaitu: Pertama, pengawasan atau pengendalian internal terbukti memiliki hubungan positif dengan akuntabilitas dan kinerja pemerintah daerah. Hal tersebut terlihat dari penelitian Rahmasari dan Doddy (2022), Nuraeni *et al.* (2023), serta penelitian lainnya. Kedua, sistem pelaporan yang baik juga berperan dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja. Sistem pelaporan membantu pemerintah mengamati, mengendalikan, dan menyampaikan pencapaian kinerja secara lebih terstruktur. Ketiga, pengawasan internal dan sistem pelaporan memiliki hubungan yang saling melengkapi. Pengawasan internal memastikan proses dan data yang digunakan dalam pelaporan dapat dipercaya, sedangkan sistem pelaporan menjadi sarana untuk menyampaikan hasil kinerja kepada principal dan pemangku kepentingan.

Sehingga, dari beberapa penelitian terdahulu diatas dapat disimpulkan bahwa pengawasan internal memiliki peranan penting dalam meningkatkan kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah. Pengawasan internal melalui pemeriksaan, reviu, evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut dapat membantu memastikan bahwa proses pengukuran dan pelaporan kinerja berjalan sesuai dengan ketentuan serta menghasilkan informasi yang dapat dipercaya. Oleh karena itu, semakin efektif pengawasan internal yang dilakukan pemerintah daerah, semakin besar kemungkinan terciptanya pelaporan kinerja yang berkualitas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah diuraikan, terdapat beberapa saran yang dapat diberikan, yaitu sebagai berikut :

Pertama, pemerintah daerah perlu meningkatkan efektivitas pengawasan internal secara berkelanjutan melalui pemeriksaan, review, evaluasi, pemantauan, dan tindak lanjut atas hasil pengawasan. Pengawasan tidak hanya dilakukan setelah kegiatan selesai, tetapi juga perlu dilakukan sejak tahap perencanaan dan pelaksanaan agar potensi kesalahan, penyimpangan, maupun ketidaksesuaian antara target dan realisasi dapat diidentifikasi serta diperbaiki lebih awal.

Kedua, pemerintah daerah perlu meningkatkan kompetensi dan kapabilitas Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP), khususnya inspektorat daerah. Peningkatan kompetensi dapat dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pengembangan kemampuan audit dan evaluasi, serta pemahaman terhadap sistem pengukuran dan pelaporan kinerja. Hal ini penting karena penelitian terdahulu menunjukkan bahwa maturitas sistem pengendalian internal dan kapabilitas auditor internal berkaitan positif dengan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

Ketiga, kualitas sistem pelaporan kinerja perlu terus ditingkatkan dengan memastikan bahwa data yang digunakan dalam laporan bersifat akurat, relevan, dapat diverifikasi, dan menggambarkan kondisi kinerja yang sebenarnya. Sistem pelaporan sebaiknya tidak hanya digunakan untuk memenuhi kewajiban administratif, tetapi juga dimanfaatkan sebagai dasar evaluasi, pengambilan keputusan, dan perbaikan program pemerintah daerah. Hal ini sejalan dengan temuan bahwa sistem pelaporan dan pengendalian internal merupakan mekanisme yang saling melengkapi dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja.

Keempat, pemerintah daerah perlu memperkuat tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan. Setiap temuan atau kelemahan yang ditemukan oleh APIP sebaiknya ditindaklanjuti secara jelas, terukur, dan tepat waktu. Dengan demikian, fungsi pengawasan tidak berhenti pada kegiatan pemeriksaan atau evaluasi, tetapi benar-benar menghasilkan perbaikan dalam proses pengelolaan program dan penyusunan laporan kinerja.

Kelima, pemerintah daerah perlu meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi dalam proses pengumpulan, pengolahan, pemantauan, dan pelaporan data kinerja. Pemanfaatan teknologi dapat membantu meningkatkan ketepatan dan keandalan informasi serta mempermudah proses pemantauan antara target dan realisasi kinerja. Peningkatan kualitas sistem informasi juga penting mengingat efektivitas pengawasan internal dapat dipengaruhi oleh kualitas sistem informasi, kompetensi APIP, komitmen pimpinan, serta kualitas pelaksanaan pengawasan.

Bagi peneliti selanjutnya, disarankan untuk mengembangkan penelitian dengan menggunakan pendekatan kuantitatif atau metode campuran sehingga pengaruh pengawasan internal terhadap kualitas pelaporan kinerja dapat diuji secara lebih empiris. Penelitian selanjutnya juga dapat mempertimbangkan variabel lain seperti kompetensi APIP, kualitas sumber daya manusia, pemanfaatan teknologi informasi, komitmen organisasi, transparansi, maturitas SPIP, dan efektivitas tindak lanjut hasil pemeriksaan. Hal ini dapat memperluas penelitian karena studi mengenai pengaruh pengawasan internal secara khusus terhadap kualitas pelaporan kinerja pemerintah daerah masih relatif terbatas.

DAFTAR REFERENSI

- Auditya, L., Husaini, & Lismawati. (2013). Analisis pengaruh akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jurnal Fairness*, 3(1), 21–42.
- Hendrianto, Alamsyah, S., & Indrawan, A. (2022). Implementasi pelaporan akuntansi sektor publik dan pengendalian intern terhadap akuntabilitas kinerja pada instansi pemerintah. *Balance: Economic, Business, Management, and Accounting Journal*, 19(2).
- Jannah, M., Mahmud, M., Winarna, J., & Sutaryo. (2021). The effect of financial performance on performance accountability of regency/city governments in Indonesia. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 8(7), 509–521. <https://doi.org/10.18415/ijmmu.v8i7.2851>
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1967). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(10), 305–360.
- Mahsun, M. (2006). *Pengukuran kinerja sektor publik*. BPFE.
- Mattoasi, Musue, D. P., & Rauf, Y. (2021). Pengaruh sistem pengendalian internal pemerintah terhadap kinerja pemerintah daerah. *Jambura Accounting Review*, 2(2), 100–109.
- Muhtar, & Arifin, T. (2021). Performance accountability in Indonesian local governments: Does monitoring really work? *International Journal of Business and Society*, 22(3), 1673–1692. <https://doi.org/10.33736/ijbs.4329.2021>
- Mujannah, Safriansyah, Firdausi, I., & Fatimah, S. (2022). Dampak accrual basic dan sistem pengendalian intern pemerintah terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. *Owner: Riset & Jurnal Akuntansi*, 6(3), 2767–2778. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i3.1006>
- Nuraeni, I., Pramita, Y. D., & Afif, N. (2023). Pengaruh kualitas laporan keuangan, pemanfaatan teknologi, pengendalian internal dan sistem pelaporan terhadap akuntabilitas kinerja. *Borobudur Accounting Review*, 3(2), 102–112. <https://doi.org/10.31603/bacr.11050>
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. (2012).
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman umum penetapan indikator kinerja utama di lingkungan instansi pemerintah. (2007).
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem pengendalian intern pemerintah. (2008).
- Prakoso, F. B., & Aryati, T. (2024). The effect of control system maturity and the government internal oversight capability level on audit opinions. *Jurnal Ilmiah Akuntansi Kesatuan*, 12(1), 55–64. <https://doi.org/10.37641/jiakes.v12i1.2418>
- Putri, A. S. (2025). Government performance accountability: The role of IT, internal control, performance-based budgeting, and organizational commitment. *Jurnal Akuntansi dan Auditing Indonesia*, 29(2), 320–333. <https://doi.org/10.20885/jaai.vol29.iss2.art11>

- Rahmasari, A., & Setiawan, D. (2022). Maturity of internal control system, the capability of internal auditors, and performance accountability in local governments. *Jurnal Tata Kelola dan Akuntabilitas Keuangan Negara*, 8(2), 159–176. <https://doi.org/10.28986/jtaken.v8i2.830>
- Sari, F., & Setiawaty, A. (2025). Pengaruh sistem pengendalian intern pemerintah dan aksesibilitas laporan keuangan terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan desa. *Jurnal Akuntansi dan Governance*, 5(2), 203–221. <https://doi.org/10.24853/jago.5.2.203-221>
- Sari, O. D. S., & Hidayat, M. T. (2025). Pengaruh transparansi pengelolaan keuangan daerah dan sistem pengendalian internal terhadap akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada OPD Kota Surabaya. *Jurnal Riset Akuntansi dan Keuangan*, 11(1), 49–59.
- Sumarsono, S. (2010). *Manajemen keuangan pemerintahan*. Graha Ilmu.
- Temalagi, S., Nirwana, & Indrijawati, A. (2026). Pengaruh kompetensi sumber daya manusia dan sistem pengendalian internal terhadap kinerja organisasi perangkat daerah. *Jurnal Akuntansi Kompetif*, 9(1), 162–174.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. (2014).
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah. (2015).
- Viola, I. R., Andriana, & Wardhaningrum, O. A. (2023). Pengaruh kejelasan sasaran anggaran, pengendalian internal dan kualitas sumber daya manusia terhadap akuntabilitas kinerja pemerintah (studi empiris pada SKPD Kota Probolinggo Provinsi Jawa Timur). *Jurnal Riset Akuntansi Aksioma*, 22(1), 92–102. <https://doi.org/10.29303/aksioma.v22i1.191>
- Widiyastuti, M., Aryani, Y. A., Setiawan, D., & Winarna, J. (2025). Local government performance accountability: Do internal control, public monitoring, and e-government affect? *Journal of Accounting and Business Education*, 10(2), 33–49. <https://doi.org/10.17977/jabe.v10i2.53991>